

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah salah satu wujud dari pesta demokrasi atas hak kedaulatan yang dimiliki rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pemilu dilandasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila sila keempat dijelaskan bahwa sebagai warga negara dalam rangka ikut serta terlibat dalam sistem pemerintahan, dapat dilakukan dengan menunjuk perwakilan. Perwakilan ini dapat dipilih melalui pemilihan umum secara langsung agar sesuai dengan harapan masing-masing orang, yang dipercaya dapat menjadi wakil mereka dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat pada sistem pemerintahan. Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk memilih anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kepala Daerah, serta Presiden. Pada penelitian ini dikhususkan pada Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan guna melengkapi sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wadah bagi masyarakat di suatu daerah untuk menentukan pilihan pemimpin yang dianggap layak memimpin daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara langsung dan demokratis. Pemilihan Kepala daerah tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut dilaksanakan secara serentak oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada tahun 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, hal ini dikarenakan pertama kali dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia. Landasan dasar pelaksanaan pilkada tahun 2020 yaitu Perppu No 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh presiden kemudian disahkan menjadi UU No 6 Tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu perbedaan yang terjadi pada Pilkada 2020 adalah mengenai masa kampanye yang dipersingkat dan masa jabatan kepala daerah yang lebih singkat.

Keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin merupakan esensi utama dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Setelah memasuki masa reformasi, rakyat diberikan kewenangan untuk menentukan keputusan politik yang dapat dilakukan mandiri secara langsung. Keputusan yang diambil oleh rakyat tentu akan mempengaruhi jalan sistem demokrasi. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tentu akan melibatkan peran masyarakat yang ada di daerah tersebut. Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung melalui keikutsertaan pemilihan kepala daerah merupakan proses membantu dalam merumuskan suatu kebijakan yang akan diterapkan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan dengan cara menentukan calon yang tepat nantinya akan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan program kebijakan-kebijakan yang telah ditawarkan pada masa pemilihan.

Dalam mengukur perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah setidaknya terdapat tiga pertimbangan dalam menentukan pemimpin yang diikuti masyarakat yaitu *Akseptabilitas*, *Kapabilitas*, *Kompabilitas*¹. *Akseptabilitas* adalah parameter yang mengukur tingkat penerimaan pemilih terhadap suatu calon kandidat. Penerimaan yang didapat tentu akan mempengaruhi kemenangan calon tersebut dengan memperoleh suara terbanyak karena adanya dukungan politik yang kuat. *Kapabilitas* adalah kemampuan diri seorang calon kandidat secara intelektual dan moral yang dapat dilihat melalui jejak rekam. Jejak rekam tersebut berisi mengenai riwayat hidup, pendidikan, sikap, dan perilaku selama ini. Dengan adanya rekam jejak tersebut dapat menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang telah dilalui dalam bidang kepemimpinan. *Kompabilitas* adalah kemampuan seorang calon dalam beradaptasi untuk dapat membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi pemerintahan dengan cara menampung aspirasi masyarakat umum. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemimpin yang memberikan perhatian lebih pada masyarakat baik dalam bidang kesejahteraan dan kemakmuran. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam

¹ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, cetakan IV, Penerbit Fokus Media, Bandung. 2003, hlm, 118-119

menentukan pilihannya yaitu melihat pada keseriusan calon kandidat menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai pemimpin.²

Pemilihan kepala daerah Ponorogo 2020 diikuti oleh dua pasang calon kandidat yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Sugiri Sancoko-Lisdyarita yang merupakan kader partai PDI Perjuangan dan juga didukung oleh beberapa partai yaitu PDI Perjuangan, PAN, PPP dan Partai Hanura. Pasangan nomor urut 2 yaitu Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono yang diusung oleh Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, Golkar dan PKS. Ipong Muchlissoni merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Ponorogo pada periode 2015-2020. Selain itu Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlissoni pernah bersaing bersama memperebutkan kursi bupati pada pemilihan kepala daerah Ponorogo periode sebelumnya. Pada pemilihan kepala daerah Ponorogo 2015, diikuti oleh empat pasangan calon yang memperebutkan kursi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Empat pasangan calon tersebut yaitu Sugiri Sancoko-Sukirno yang diusung oleh Golkar, Demokrat, PKS, dan Hanura. Pasangan Amin-Agus Widodo diusung oleh PKB dan PDI Perjuangan. Pasangan Misranto-Isnen Supriyono melalui jalur independen. Pasangan Ipong Muchlissoni-Soedjarno yang diusung oleh Gerindra, PAN, dan NasDem. Hasil dari pilkada 2015 dimenangkan oleh pasangan Ipong Muchlissoni-Soedjarno yang memperoleh suara sebesar 219.949 suara atau sebesar 39,37 persen. Kemudian pada urutan kedua terdapat pasangan Sugiri Sancoko-Sukirno yang memperoleh 205.587 suara atau sebesar 36,8 persen. Urutan ketiga pasangan Amin-Agus Widodo memperoleh 123.761 suara atau 22,15 persen dan yang terakhir pasangan Misranto-Isnen Supriyono hanya memperoleh 9.416 suara atau sebesar 1,68 persen. Kegagalan yang dialami oleh Sugiri Sancoko tentu tidak membuat beliau pantang menyerah. Hal tersebut dibuktikan dengan keberaniannya dalam mencalonkan diri kembali pada pemilihan kepala daerah kabupaten Ponorogo 2020.

² ibid

Pada Pemilihan Kepala Daerah Ponorogo tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Sugiri Sancoko-Lisdyarita sebanyak 352.047 suara atau sebesar 61,75 persen. Sedangkan pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono hanya memperoleh suara 218.073 atau sebesar 38,25% . Kemenangan pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita dengan perolehan suara terbanyak terdapat di Kecamatan Babadan dengan jumlah 26.059 suara yang didapatkan. Kecamatan Babadan merupakan kecamatan yang memiliki basis suara tertinggi pada setiap periode Pilkada, dimana dengan peringkat kedua yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak yaitu sebesar 54.456 orang di Kabupaten Ponorogo. Hal ini menjadikan Kecamatan Babadan menjadi kecamatan yang strategis dengan memiliki jumlah pemilih yang banyak. Maka dari itu banyak calon kandidat yang memperebutkan untuk memperoleh suara di kecamatan tersebut.

Kemenangan pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik. Salah satu faktor yaitu partai politik, dimana partai politik memiliki peran penting dalam setiap ajang pemilihan umum. Pada pemilihan kepala daerah 2020 pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita diusung oleh partai PDI Perjuangan, PAN, PPP dan Partai Hanura yang hanya memiliki jumlah 9 kursi di DPRD Ponorogo. Sedangkan pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono yang diusung oleh Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, Golkar dan PKS yang memiliki jumlah 36 kursi di DPRD Ponorogo. Kemenangan pasangan calon Sugiri Sancoko-Lisdyarita yang didukung oleh partai PDI Perjuangan, PAN, PPP dan Partai Hanura merupakan hal yang luar biasa.

Selain faktor partai politik terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pasangan calon kandidat yang akan dipilih yaitu faktor visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon. Visi dan misi yang ditawarkan pada saat kampanye merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting. Visi dan misi tersebut merupakan komitmen paslon dalam membangun daerah yang akan dipimpin kedepan. Bagi pemilih rasional menentukan calon

kandidat yang dipilih dapat menggunakan acuan berdasarkan visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon. Sehingga pemilih dapat mempertimbangkan perolehan manfaat yang akan didapatkan apabila memilih kandidat tersebut.

Pada perilaku memilih terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Babadan. Pada pendekatan Columbia Model yang biasa disebut dengan pendekatan sosiologis menjelaskan terkait pengaruh sosiologis antara pemilih dan calon, dimana hal tersebut menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan kandidat yang akan dipilih. Pada Pilkada 2020 faktor sosiologis terbukti sedikit berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat khususnya pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan. Selain itu terdapat pendekatan psikologis yang dikenal dengan Michigan Model. Pendekatan psikologis menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan emosional atau dorongan psikologis seseorang yang dapat membentuk kecondongan politik seseorang pemilih. Kedekatan seseorang terhadap partai politik maupun calon kandidat mempengaruhi pilihan politik seorang pemilih.³ Kemudian terdapat pendekatan pilihan rasional yang menjadi alasan utama seseorang memilih dalam Pilkada. Program yang ditawarkan serta rancangan visi misi kandidat dapat menjadi daya tarik pemilih untuk berpartisipasi dalam menentukan kandidat pada Pilkada.

Maka dari itu terdapat beberapa faktor yang menjadi komponen dari terciptanya perilaku memilih pemilih, yang mencakup:

Pertama, penyelenggaraan Pilkada merupakan persaingan antar kandidat dalam memperebutkan jabatan sebagai kepala daerah, masing-masing kandidat bersaing melakukan kampanye politik untuk memperkenalkan dirinya agar mendapatkan dukungan dari pemilih dengan cara melakukan kampanye terkait visi, misi, dan program kerja yang akan dijalankan apabila terpilih. Kedua, identitas partai yang merupakan nilai tambahan bagi kandidat yang sedang bersaing pada

³ Ian Mc Allister, et all. 2018. *Theoretical Approaches of Voter Behavior*. The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion. New York: Routledge. Hal 22-24.

Pilkada. Partai politik memiliki nilai tambahan dikarenakan memiliki jumlah pendukung banyak yang dapat membantu kemenangan partai politik tersebut beserta kandidat yang diusung. Ketiga, kemampuan kandidat dimana dapat dilihat melalui pengalaman yang telah dilakukan kandidat. Pengalaman ini dapat berupa profesi atau pekerjaan serta kegiatan yang pernah dilakukan. Dengan pengalaman tersebut maka dapat mempengaruhi keyakinan pemilih terhadap kemampuan yang dimiliki oleh kandidat, yang mana dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih kandidat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Deskriptif Pemilih Pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana profil pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo 2020 berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan agama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan profil pemilih Pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan pada Pilkada Ponorogo tahun 2020 berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa sehingga dapat dijadikan suatu referensi dan sumbangan bagi

kajian studi ilmu politik di Indonesia yang membahas terkait perilaku memilih (voting behavior).

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain itu harapan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi pasangan calon kepala daerah, elit politik, dan partai politik dalam mengetahui profil masyarakat di Kecamatan Babadan.

1.5 Kerangka Teori

Perilaku memilih adalah tingkah laku seseorang dalam menentukan keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk memilih kandidat dalam kontestasi pemilihan. Keputusan perilaku memilih seseorang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi. Faktor tersebut dapat berasal dari apa yang dilihat, dirasakan sehingga menjadi apa yang dipercayai. Dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, Prof Ramlan Surbakti memberikan penjelasan bahwa perilaku memilih merupakan kegiatan membuat keputusan yang dilakukan warga negara untuk menentukan apakah nantinya akan memilih atau tidak.

Menurut Firmanzah, terdapat dua hal yang dapat digunakan dalam mengukur cara memilih seseorang. Pertama, *policy problem solving* yang dijelaskan sebagai gambaran pemilih berdasarkan pilihan rasional. Kedua, terdapat kesamaan ideologi seseorang pemilih terhadap suatu partai politik maupun kandidat tertentu dimana hal tersebut merupakan gambaran dari pemilih yang menggunakan pilihan non-rasional (Firmanzah, 2007:124). Kemudian firmanzah menjelaskan terkait empat tipologi jenis pemilih:

Pertama, pemilih rasional yang digambarkan sebagai perwujudan *policy problem solving*. Dimana pemilih mempertimbangkan *policy problem solving* dalam menentukan pilihan kandidat yang akan dipilih. Pemilih akan mempertimbangkan program kerja yang ditawarkan dan pengalaman yang dimiliki kandidat ketimbang mempertimbangkan kesamaan ideologi. Kandidat akan dipilih oleh pemilih apabila menawarkan program kerja yang dapat menyelesaikan isu-isu dan permasalahan

yang terdapat di lingkungan masyarakat. Dengan membawa program kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemilih maka dapat mempengaruhi pemilih untuk berpindah pilihan. Kedua, pemilih kritis yang menggabungkan orientasi pada *policy problem solving* dengan kesamaan ideologi seseorang. Pada pemilih kritis, ikatan ideologi pemilih dengan kandidat atau partai politik tertentu menjadi hal yang dianggap penting sehingga menjadikan pemilih tidak mudah mengganti pilihan. Pemilih yang kritis merupakan pemilih yang memberikan kritik terhadap suatu sistem ideologi partai dengan program kerja yang dibawa oleh kandidat maupun partai politik. Kritik ini bersifat memberikan masukan terhadap kandidat atau partai politik untuk digunakan sebagai perbaikan dan meningkatkan kualitas program atau kebijakan yang dikeluarkan. Kritik yang tidak ditanggapi akan membuat pemilih kritis menjadi frustrasi sehingga berujung pada pembentukan partai baru yang memiliki ideologi yang sama. Ketiga, pemilih tradisional yang mengutamakan kesamaan ideologi. Pemilih ini tidak terlalu mempertimbangkan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat maupun partai politik. Pemilih tradisional mempertimbangkan kesamaan asal-usul, kedekatan sosial budaya, nilai dan agama dalam menjatuhkan pilihan kepada kandidat maupun partai politik tertentu. Pendidikan yang dimiliki oleh pemilih tradisional biasanya belum tinggi, sehingga pemilih ini seringkali dimobilisasi selama masa kampanye (Rohrschneider dalam Firmanzah, 2007:137). Keempat, pemilih skeptis yang tidak berorientasi pada ideologi maupun program atau kebijakan kandidat atau partai tertentu. Ideologi yang dimiliki oleh pemilih skeptis bersifat rendah karena hal tersebut maka keterlibatan dalam politik juga bersifat cenderung rendah. Pada golongan putih (golput) didominasi oleh pemilih skeptis. Pemilih ini menganggap bahwa siapapun yang menang tidak dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik seperti yang diharapkan.

Dalam studi perilaku memilih, terdapat tiga jenis pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku memilih. Pertama, pendekatan sosiologis atau yang disebut dengan mazhab Columbia yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dalam publikasinya yang berjudul "*The People's Choice*". Kedua, pendekatan psikologis atau disebut mazhab Michigan yang dikemukakan oleh Angus Campbell melalui

publikasinya yang berjudul “*The Voter Decides*”. Ketiga, pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) yang dikemukakan oleh Anthony Downs dalam bukunya yang berjudul “*An Economic Theory of Democracy*”

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis pertama kali dikemukakan oleh Paul L Lazarsfeld pada publikasi bukunya yang berjudul *The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* . Pendekatan sosiologis sering disebut dengan mazhab Columbia. Lazarsfeld mengusung konsep index of political predisposition. Dalam penelitian yang dilakukan Lazarsfeld menunjukkan bahwa kelompok sosial tempat mereka berada menjadi faktor yang menentukan dalam perilaku memilih. Selain itu dalam studi tahun 1954 Lazarsfeld dan Berelson tentang panel pemilih yang diwawancarai beberapa kali selama kampanye pemilu 1948 di Elmira, New York telah melakukan identifikasi sembilan belas karakteristik sosial yang berbeda yang dapat digunakan untuk memprediksi suara individu. Diantaranya adalah pentingnya jaringan sosial teman, anggota keluarga, dan rekan kerja dalam mempengaruhi serta memperkuat preferensi politik pemilih. Perilaku pemilih seseorang berkenaan dengan kelompok sosial dari tempat dimana individu tersebut berasal.⁴ Karakteristik dan pengelompokan sosial yang terjadi mempengaruhi kecenderungan politik seseorang dalam menjatuhkan pilihannya. Lazarsfeld menjelaskan bahwa perilaku pemilih didasarkan pada beberapa faktor yaitu, faktor latar belakang sosiologis seperti agama, suku, jenis kelamin, dan umur. Faktor pengelompokan sosial berdasarkan kelas ekonomi, kelompok lingkungan pertemanan, dan kegiatan dalam kelompok formal dan informal.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis dikemukakan pertama kali oleh Angus Campbell sebagai perancang dan analis pertama Studi Pemilu Nasional awal, dalam publikasinya yang berjudul *The Voter Decides*. Pendekatan ini sering disebut

⁴ Jocelyn A. S., Evans, *Voters & Voting : An Introduction*, (London : SAGE Publications, 2004), hlm. 3.

dengan mazhab Michigan. Angus Campbell dan rekan-rekannya menegaskan bahwa keberpihakan pemilih paling baik dikonseptualisasikan sebagai produk keterikatan emosional yang sudah berlangsung lama dan identifikasi dengan partai politik tertentu. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa di Amerika Serikat dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang mana didapatkan melalui sosialisasi. Keberpihakan merupakan konsep utama dalam perilaku memilih dimana keberpihakan didapatkan melalui proses sosialisasi yang dilakukan berulang kali, pengaruh oleh nilai-nilai dari keluarga, kolega dan teman sebaya. Sosialisasi yang terus dilakukan akan memunculkan ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan kelompok yang melakukan sosialisasi seperti organisasi kemasyarakatan atau partai politik tersebut. Hal tersebut yang nantinya disebut sebagai identifikasi partai. Selain itu dalam pendekatan psikologis dijelaskan bahwa pentingnya identifikasi partai dalam mempengaruhi keputusan masyarakat saat memilih.⁵ Campbell menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara identifikasi partai dengan kehendakan seseorang untuk memilih kandidat yang berasal dari partai yang menjadi tempat mengidentifikasi dirinya. Dimana pemilih partisan mampu mengartikulasikan gambaran umum dari partai pilihan mereka sebagai posisi pendukung yang diharapkan menguntungkan kelompok sosial mereka. Kavanagh mengatakan bahwa identifikasi partai merupakan pendekatan psikologis seseorang dengan partai tertentu. Hal tersebut disamakan dengan loyalitas partai atau kesetiaan seorang pemilih terhadap partai tertentu.⁶

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan Pilihan Rasional (*rational choice*) yang dijelaskan oleh Anthony Down menekankan bahwa pemilih akan memilih secara rasional dengan mempertimbangkan pengeluaran yang minim untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah pemilih menginginkan bahwa kandidat yang dipilih akan memberikan manfaat dan memenuhi janji-janji yang telah disampaikan pada kampanye. Selain itu pemilih

⁵ Angus Campbell et.al, *The American Voter* (USA : Jhon Wiley and Sons, Inc, 1966), hlm. 133.

⁶ Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior* (London : George Allen and Unwin, 1983), hlm. 88.

akan memilih kandidat yang membawa dan membela kepentingan dari pemilih. Pada pendekatan pilihan rasional fokus kepada nilai manfaat yang akan diterima oleh pemilih jika memilih salah satu pasangan calon kandidat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku memilih yang didasari oleh pilihan rasional bersifat tidak permanen, yang mana dapat berubah sesuai dengan situasi yang terjadi.

Sedangkan Bone dan Ranney menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan seseorang berorientasi berdasarkan kualitas instrumental dan kualitas simbolik.⁷ Kualitas Instrumental yaitu keyakinan pemilih terhadap kemampuan pribadi kandidat dalam mewujudkan kebaikan bagi masyarakat. Sedangkan kualitas simbolik merupakan kepribadian yang harus dimiliki seorang calon kandidat sebagai pemimpin. Dari beberapa teori yang dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan pilihan rasional berdasarkan pendekatan perspektif rasional pemilih, baik pada kebutuhan yang diperlukan maupun keuntungan yang akan diterima. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang warga berperilaku rasional yaitu berupa visi-misi, program kerja maupun gambaran yang akan diterima pemilih apabila memilih kandidat tersebut.

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis untuk menggambarkan profil pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan pada Pilkada Ponorogo tahun 2020 berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan agama.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah peran warga negara dalam proses pemerintahan yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, bentuk dari partisipasi

⁷ Hugh A Bone and Austin Ranney, *Politics and Voters*, (USA: McGraw-Hill, 1981), hlm 9.

politik dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Selain itu menurut jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (2014) Karya Tia Subekti, sifat dari kegiatan partisipasi politik adalah berupa individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, selain itu efektif atau tidak. Dalam segala kebijakan dan keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah tentu berhubungan dan mempengaruhi kehidupan oleh warga negara, maka dari itu setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan isi keputusan tersebut.

Huntington dan Nelson (dalam Sanit, 1998:4) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua yaitu partisipasi politik yang otonom (Autonomous Participation) dan partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh orang lain (Mobilized Participation). Dalam pembagian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan partisipasi terdapat unsur tekanan atau manipulasi. Sedangkan menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976:45) membagi jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya dengan membagi kedalam empat kategori derajat partisipasi politik sebagai berikut:

Gambar 1.1
Piramida Partisipasi Politik



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976: 159)

Penjelasan mengenai kegiatan masing-masing derajat partisipasi politik dalam gambar piramida diatas. Pertama, apolitis merupakan warga negara yang memilih apatis untuk menarik diri dari partisipasi politik dalam segala pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua, pengamat yaitu warga negara yang hanya berorientasi pada kehadiran mereka pada rapat-rapat umum, mengikuti perkembangan hanya melalui media massa, dan memberikan hak suara dalam pemilihan. Ketiga, partisipan merupakan warga negara yang aktif dalam kegiatan-kegiatan politik seperti mengikuti tim kampanye, anggota partai, mengikuti kelompok-kelompok sosial. Keempat, aktivis dari pejabat partai penuh waktu atau warga negara yang memiliki jabatan penting dalam partai atau kelompok kepentingan.

1.6.2 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih pasang calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepalah daerah dipilih secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pilkada. Penyelenggaran Pilkada merupakan bentuk pemberian hak dasar kepada masyarakat untuk menentukan orang-orang yang akan menjalankan keberlangsungan pemerintahan di daerah tersebut, yang mana pada penelitian yang dimaksud adalah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

1.6.3 Kampanye Politik

Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan pilihan. Kampanye politik paling sering dilakukan pada saat pemilihan umum termasuk pada pemilihan Kepala Daerah. Dimana pada saat kampanye kita dapat melihat langsung masing-masing calon melakukan kampanye untuk menarik pemilih agar memilih mereka. Kampanye merupakan salah satu hal

penting yang dilakukan pada kontestasi pemilihan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 ayat 26 yaitu berbunyi:

“Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”

Menurut Lilleker dan Negrine yang dikutip Firmanzah dalam bukunya yang berjudul *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* menjelaskan bahwa kampanye politik merupakan dimana kontestan mengenalkan program kerja kepada masyarakat untuk mempengaruhi opini masyarakat agar pada saat pemilu memberikan suara kepada mereka. Kegiatan kampanye politik diberi tenggat waktu oleh panitia pemilu. Maka dari itu Firmanzah mendefinisikan kampanye sebagai aktivitas politik yang melakukan pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai dan juga iklan-iklan yang bermuatan politik (Firmanzah, 2007:268).

Kampanye memiliki berbagai jenis, sesuai dengan surat keputusan KPU No 35 tahun 2004 yang mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Terdapat sembilan jenis atau bentuk kampanye:

1. Debat Publik / debat terbuka antar calon,
2. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,
3. Pemasangan alat peraga di tempat umum,
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
5. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,
6. Penyiaran melalui radio dan atau televisi,
7. Pertemuan terbatas,
8. Rapat umum, dan
9. Tatap muka dan dialog.

Dalam buku Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu:⁸

- *Product Oriented Campaigns* adalah kampanye yang berfokus pada produk, kampanye ini terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial. Kampanye ini bertujuan untuk membentuk citra positif terhadap barang yang diperkenalkan ke publik. Selain itu kampanye ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.
- *Candidate Oriented Campaigns* adalah kampanye yang berfokus pada kandidat. Kampanye ini dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Maka dari itu kampanye ini disebut juga dengan kampanye politik. Dimana kampanye ini dilakukan menjelang kontestasi pemilihan. Tujuan dari dilakukannya kampanye ini yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar memilih kandidat tersebut dan dapat memenangkan kontestasi pemilihan umum.
- *Ideologically-oriented campaigns* adalah kampanye yang berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau Social Change Campaigns. Tujuan dari diadakannya kampanye ini yaitu untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Jenis kampanye ini berbeda dengan kedua kampanye sebelumnya, dimana kampanye ini tergolong pada kampanye perubahan sosial yang mencakup berbagai bidang baik lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
- *Kampanye yang menyerang (attacking campaign)*
 - (1) Kampanye negatif adalah kampanye yang bertujuan menyerang pihak lawan dengan sejumlah data atau fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya dan dapat diperdebatkan.

⁸ Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Rosda. 2009 Hal 48-49

- (2) Kampanye hitam adalah kampanye yang bertujuan untuk menciptakan citra buruk yang dilakukan dengan strategi menjatuhkan lawan demi keuntungannya.

1.7 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu karakteristik pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita, karakteristik ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan agama. Variabel yang digunakan akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Untuk menggambarkan profil pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan melalui karakteristik responden yang dipilih oleh penulis.

1.8 Metode Penelitian dan Fokus Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada profil pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan dengan melihat karakteristik pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo 2020. Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Babadan merupakan kecamatan dengan perolehan suara terbanyak dari kemenangan pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita pada Pilkada Ponorogo 2020.

1.8.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan objek yang diteliti secara objektif dengan sistematis, fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan secara fakta mengenai suatu variabel, gejala, atau keadaan (Arikunto, 2005:234).

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Babadan merupakan kecamatan

dengan perolehan suara tertinggi yaitu sebesar 26.059 suara memilih pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo 2020 sehingga Kecamatan Babadan menjadi representasi pilihan mayoritas pemilih dibandingkan dengan kecamatan lain.

1.8.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pada perolehan jumlah suara di kecamatan Babadan yang merupakan populasi dari penelitian ini diketahui sebanyak 26.059 suara. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane (Bungin, 2005) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah Populasi

d^2 = Nilai Presisi yang diterapkan sebesar 10 %

1 = Konstanta

Berdasarkan rumus Yamane, maka penghitungan sampel penelitian ini adalah:

$$n = \frac{26.059}{26.059 \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{26.059}{26.059 \cdot (0.01) + 1}$$

$$n = 99,61$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 100 orang yang akan menjadi kuota sampel mewakili populasi dari 26.059 pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling berupa *Quota Sampling*. Menurut Sugiyono, teknik quota sampling adalah menentukan sampel dari suatu populasi berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang sudah ditetapkan hingga jumlah (kuota)

yang diinginkan terpenuhi. Dalam penelitian ini, menggunakan kuota sampling untuk mendapatkan sampel dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi yaitu, pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita pada Pilkada Ponorogo 2020 khususnya di Kecamatan Babadan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu proses penting dalam penelitian, dimana data yang dicari merupakan acuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mendapatkan data yang dicari pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari lokasi penelitian yaitu Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan melakukan penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab. Kuesioner dianggap tepat apabila digunakan pada responden yang berjumlah banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Teknik kuesioner akan efisien apabila telah diketahui dengan pasti terkait variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dilakukan terhadap responden yang mewakili pemilih pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita di Kecamatan Babadan. Dalam penyebaran kuesioner ini responden yang mengisi tidak dapat dijelaskan mewakili populasi akan tetapi mewakili informasinya.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber, misalnya dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, buku-buku, penelitian terdahulu, artikel dan jurnal dari internet.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam sebuah penelitian, data-data yang telah terkumpul merupakan data yang masih mentah dan perlu untuk dilakukan pengolahan data. Data yang telah diolah dapat diinterpretasikan sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dari penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat proses-proses dalam melakukan pengolahan data yaitu *Editting* atau pemeriksaan awal dimana data yang diperoleh dari lapangan selesai dihimpun, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dan memenuhi syarat. *Coding* melakukan klasifikasi jawaban berdasarkan macamnya dengan memberikan kode angka pada data tersebut. *Tabulating* merupakan tahap pengolahan data dengan memasukkan data ke dalam *variabel view* dan *data view* pada aplikasi SPSS. Penelitian ini akan melakukan analisis data dengan menggunakan distribusi frekuensi data.